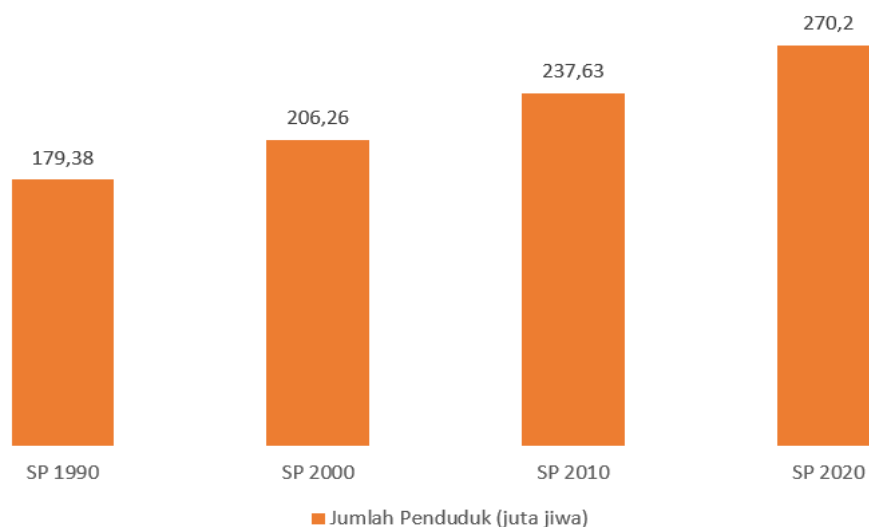


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan rencana pembangunan berskala nasional yang bertujuan pada pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa melupakan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan pembangunan berkelanjutan memang tidak luput dari kelestarian alam yang menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pada kelestarian lingkungan akan meningkatkan daya mutu kehidupan dengan menjaga lingkungan. Hal ini merupakan upaya menjaga bumi dari kehancuran dan kerusakan ekosistem untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan dinamis. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, seluruh sektor masyarakat harus terlibat, tantangannya adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dan diiringi dengan kebutuhan yang semakin kompleks yang mana hal ini merupakan fenomena yang tidak dapat terpisahkan di negara berkembang.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 1990-2020

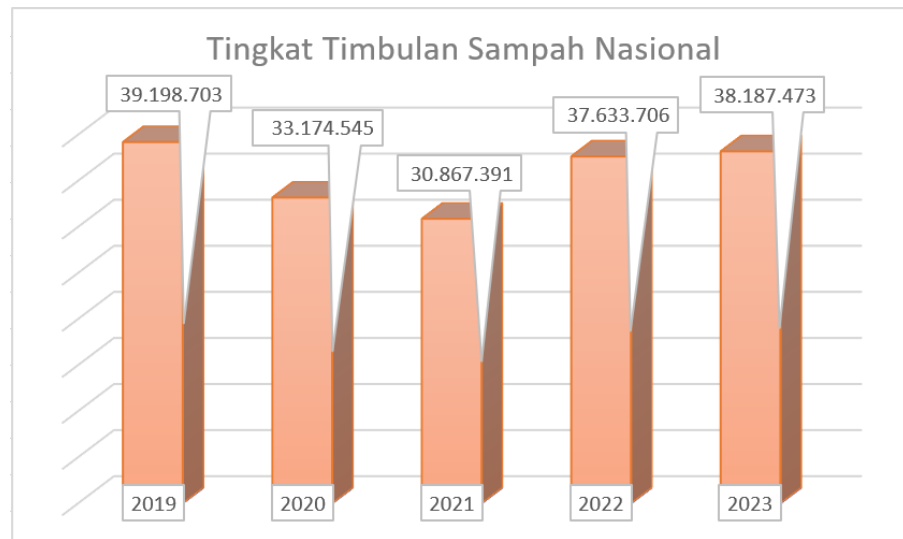
Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data Website BPS 2023

<https://www.bps.go.id> (diakses pada 2/6/2023 jam 20.30)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia yang selalu meningkat setiap 10 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 dengan 270,20 juta jiwa jika mempertimbangkan pertumbuhan penduduk tahun 2010 yang pertumbuhannya sebanyak 32,56 juta jiwa. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah negara China, India, dan Amerika (katadata.co.id, 2020). Jika melihat dari hal ini, tentu saja akan terdapat berbagai segala persoalan lingkungan, seperti permasalahan sampah yang menjadi fokus utama dunia. Kepadatan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya tentu akan berdampak pada kebutuhan manusia yang semakin kompleks akan menyebabkan volume sampah yang terus meningkat. Merujuk pada Lavany (2022:572), dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan sampah yang diakibatkan kurangnya

kesadaran tentang pengelolaan sampah. Tingginya jumlah penduduk berkaitan erat dengan pengelolaan sampah yang jika tidak disertai pola hidup yang buruk akan memberikan dampak pada meningkatnya barang-barang yang menghasilkan sampah. Akibat dari padatnya penduduk dapat berimbas pada pengelolaan sampah, dengan terbatasnya tempat yang digunakan sebagai fasilitas dalam pengolahan sampah. serta adanya kelangkaan lahan yang digunakan sebagai sarana pembuangan sampah serta tingginya biaya yang digunakan dalam pengelolaan sampah tidak sebanding dengan kebutuhan layanan sampah yang semakin meningkat.

Berkaca pada negara lain yang memiliki permasalahan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 meluncurkan sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) berbasis *website* yang dapat digunakan secara massal (cloudcomputing.id, 2021). Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), data jumlah timbulan sampah dapat diketahui melalui Gambar 1.2 yang menginformasikan bahwa terdapat perbedaan timbulan sampah skala nasional pada setiap tahun mulai tahun 2019 hingga 2023.



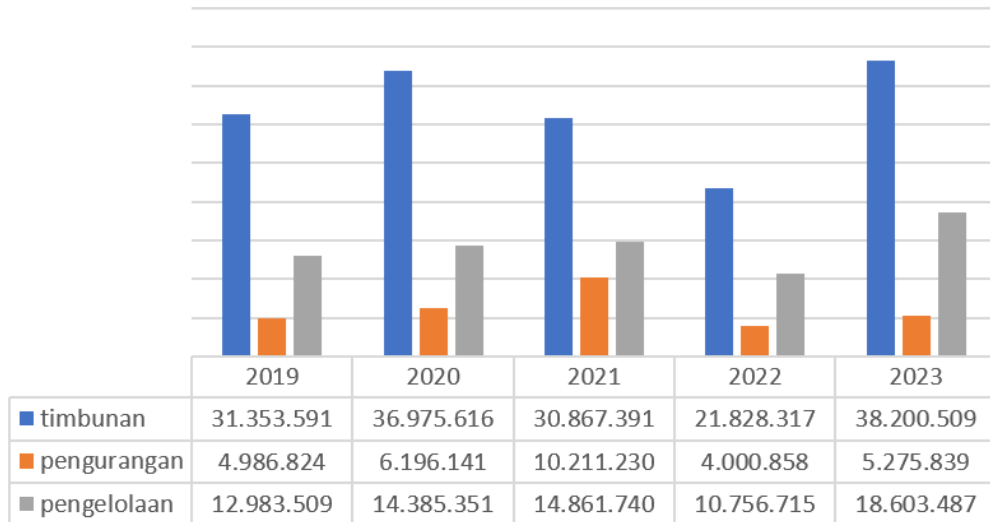
Gambar 1.2 Tingkat Timbulan Sampah Nasional (Juta Ton/Tahun)

Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data Website SIPSN 2024

<http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (diakses pada 2/6/2024 jam 21.00).

Permasalahan lingkungan yang banyak terjadi adalah pengelolaan sampah tidak baik. Data statistic Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia tahun 2022 yang menyatakan bahwa sekitar 69% sampah di Indonesia masih diolah secara tidak baik, seperti dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pemilahan atau pengolahan yang tidak sesuai standar. Sampah yang merupakan hasil akhir dari kegiatan masyarakat perlu adanya pengelolaan dengan baik agar tidak menjadi sumber permasalahan di kehidupan. Pengelolaan sampah pada berbagai wilayah di Indonesia sampai saat ini belum mencapai titik yang baik. Banyaknya kesulitan yang didapatkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut baik meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi yang belum mencukupi.

Capaian Pengelolaan Sampah



Gambar 1.3 Hasil Capaian Pengelolaan Sampah (Juta Ton/Tahun)

Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data Website SIPSN 2024

<http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn//> (diakses pada tanggal 3 Juni 2024 jam 09.47).

Berdasarkan grafik diatas mengenai hasil dalam pengelolaan sampah atas 291 Kabupaten/Kota seIndonesia. Terdapatnya 4,9 juta ton sampah menempuh prosedur pengurangan sampah tahun 2019, tahun 2020 sebanyak 6,1 juta ton sampah menempuh prosedur pengurangan sampah, pada tahun 2021 hanya 10 juta ton sampah yang menempuh prosedur pengurangan sampah, sedangkan tahun 2022 sebanyak 4 juta ton sampah mengalami prosedur pengurangan sampah, dan tahun 2023 5 juta ton sampah mengalami prosedur pengurangan sampah. Dapat disimpulkan jika upaya dalam pengurangan sampah melalui pendauran ulang, pembatasan dan pemanfaatan ulang dapat dikatakan tidak maksimal dan tidak seimbang dengan meningkatnya intensitas sampah. Dalam pengelolaan sampah yang mengalami prosedur penanganan sampah melalui sistem pilah sampah,

pengangkutan, pengolahan dan proses akhir berdasarkan grafik diatas terdapatnya perbedaan antara jumlah penanganan sampah dan timbulan sampah dapat disimpulkan jika upaya penanganan sampah tidak berjalan dengan baik serta tidak seimbang dengan sampah yang terus meningkat.

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan masalah yang sangat serius yang diakibatkan kompleksnya masalah yang dialami serta pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Permasalahan yang sering terjadi antara lain sumber dana yang terbatas sehingga menghambat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah yang optimal menurut Direktur pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar mengatakan anggaran pengelolaan sampah di daerah kabupaten kota rata-rata hanya sekitar 0,05-0,07% dari total APBD yang dapat dikatakan sangat rendah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tata kelola sampah serta rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat untuk berperan dalam menjaga lingkungan yang hanya sebesar 37% berdasarkan hasil survey Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, budaya yang memandang bahwa sampah sesuatu yang tidak penting dan menganggap pekerjaan sebagai pemulung sebagai pekerjaan yang rendah, dan penerapan pengelolaan sampah modern hanya 50% dari seluruh daerah di Indonesia menurut KLHK tahun 2019. (antaranews.com, 2022)

Masalah pengelolaan sampah menjadi sangat serius sebagai akibat dari kompleksnya masalah dan pertumbuhan penduduk, oleh karena itu tata kelola persampahan sering diutamakan penanganannya hanya di daerah kota saja (Moersid, 2004). Masalah pada tata kelola sampah yang selalu terjadi pada pola

hidup masyarakat yang mengarah pada pola hidup yang konsumtif berakibat pada peningkatan sampah yang membebankan pada keterbatasan sumber daya sehingga sampah tidak dikelola dengan baik.

Kunci utama dari adanya masalah persampahan adalah peningkatan penduduk yang berpengaruh terhadap peningkatan sampah sebagai hasil kegiatan masyarakat sehari-hari. Merujuk pada Sekarsari & Tritanti, (2020:20) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa masyarakat Kota Malang selalu meningkat setiap waktu sebesar 1%. Dengan bertambahnya penduduk akan mempengaruhi jumlah timbulan sampah di Kota Malang. Serupa dengan hal ini, peningkatan penduduk yang terjadi di Jakarta Timur pada kenyataannya berpengaruh besar terhadap timbulan sampah dan akan menjadi permasalahan yang selalu hadir dimasyarakat. Berikut adalah grafik yang menyajikan peningkatan penduduk Jakarta Timur.



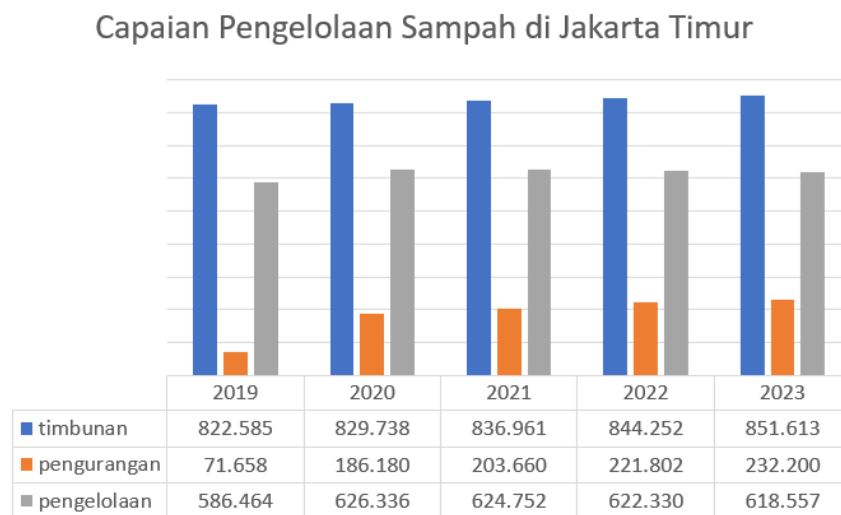
Gambar 1.4 Pertumbuhan Penduduk Jakarta Timur

Sumber: Data Olahan Peneliti dan data *website* BPS Kota Jakarta Timur

<https://jaktimkota.bps.go.id/id>

(diakses pada tanggal 20 September 2024 jam 13.24)

Demikian yang terjadi di Kota Jakarta Timur sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia, sampah merupakan masalah yang sangat kompleks. Kebijakan tata kelola persampahan DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelolaan Sampah.



Gambar 1.5 Hasil Capaian Pengelolaan Sampah di Jakarta Timur

Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data SIPSN <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (diakses pada tanggal 20/9/2024 jam 14.33).

Grafik tersebut adalah capaian dalam pengelolaan sampah yang terdapat pada Jakarta Timur. berdasarkan perbedaan diantara jumlah timbunan sampah, pengurangan sampah, dan pengelolaan sampah dapat disimpulkan jika dalam proses tata kelola sampah di Jakarta Timur tidak berjalan secara maksimal serta tidak sebanding dengan jumlah sampah yang terus meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui jika pada 2020 sekitar

185.753 ton sampah diproduksi setiap harinya, rata-rata satu orang menghasilkan sampah sebanyak 0.7 kg per hari. (greeners.co, 2021). Menurut survei mengenai perilaku pemilahan sampah yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap masyarakat di Jakarta, sebanyak 50,8 persen responden tidak melakukan pemilahan sampah serta hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) mengungkapkan jika 66,8 persen masyarakat masih membakar sampah rumah tangga tanpa dipilah. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta ketergantungan terhadap pemerintah dalam menangani masalah sampah dapat terlihat dari kebiasaan membuang sampah dan kurangnya dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah. (katadata.co.id, 2020)

Tabel 1. 1 Sejarah Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta

Tahun	Pengelolaan Sampah
Sebelum tahun 1990	Pengelolaan sampah masih sangat sederhana. Sampah biasanya dikumpulkan secara manual oleh petugas dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang terletak di Bantar Gebang, Bekasi
1990-2000	Pemerintah DKI Jakarta melalui program pengelolaan sampah berbasis 3R. Program ini mendorong masyarakat untuk melakukan pengurangan, pemanfaatan ulang dan mendaur ulang sampah. Pada tahun ini pusat pengumpulan sampah mulai didirikan disetiap kelurahan dan beberapa fasilitas daur ulang dibangun
2000-2010	Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan program Pengelolaan Sampah Terpadu (PST). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan dan pengolahan sampah secara terintegrasi. Selain itu pemerintah juga mengencangkan kegiatan mengenai Pendidikan lingkungan, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos, serta pengelolaan sampah plastic dan kertas.
2010-2015	Pemerintah DKI Jakarta Menyusun masterplan persampahan DKI Jakarta sebagai panduan pengelolaan sampah jangka Panjang. Masterplan ini mencakup perencanaan infrastruktur, teknologi pengolahan, pemilihan lokasi TPA yang baru dan pengenalan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat
2016-sekarang	Program “Zero Waste to Landfil” (Sampah Nol ke Tempat Pembuangan Akhir). Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengembangkan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti pengenalan bank sampah, penggunaan teknologi pengolahan lanjutan seperti incinerator dan pengembangan sistem daur ulang.

Sumber : Data Olahan Peneliti dan Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dalam matriks, terdapat perkembangan pada pengelolaan sampah di DKI Jakarta dimana setiap program terdapat perkembangan yang signifikan dan berjalan kearah yang lebih baik. Pemerintah DKI Jakarta juga mengutamakan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan dukungan transportasi dan fasilitas pengelolaan sampah yang berkualitas dari pemerintah. Dengan system ini masyarakat harus melakukan pemilahan sebelum dibuang dan diangkut oleh pengelola sampah.



Gambar 1.6 Klasifikasi Pemilahan Sampah dan Jadwal Pengangkutan Jakarta Recycle Centre (JRC)

Sumber: M I N Muhashiby, Hayati Sari Hasibuan, & S. Wahyono. (2021).

Berdasarkan klasifikasi sampah yang ditunjukkan di atas, sampah tersebut masih harus dipilah lagi menurut jenis spesifikasi dan komponen yang akan didaur ulang secara efektif dan efisien. Misalnya kaleng, kaca, dan logam dengan pengangkutan pada hari minggu. Jenis-jenis sampah tersebut masih harus

dipisahkan lagi sesuai jenisnya masing-masing. Partisipasi masyarakat sebagai kunci dalam pemilahan sampah yang akan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Masalah dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sampah, dengan berpikir bahwa sampah sebagai barang yang harus dibuang tanpa mengetahui hal seperti apa yang akan dihasilkan dari sampah tersebut (MacKenzie, Baadjies, & Seedat, 2015). Sejatinya sampah yang dibuang tersebut hanya pindah ke tempat yang lain dan akan menjadi permasalahan baru.

Tata kelola persampahan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Pelaksanaan dalam tata kelola sampah di Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada PERGUB no 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam tata kelola sampah dari rumah tangga dan PERGUB no 33 tahun 2021 tentang bank sampah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recyle* (3R) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan dunia usaha serta sebagai sarana edukasi mengenai tata kelola sampah dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan undang-undang No 18 Tahun 2008 dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan fasilitas, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan ulang sampah dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam tata kelola sampah. Peraturan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, perlu diadakannya kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain diluar pemerintahan dalam tata kelola sampah di Provinsi DKI Jakarta. Menurut pasal 4 dalam Perda DKI Jakarta No 4 tahun 2019, Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam tata kelola sampah.

Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang pernah dilakukan di DKI Jakarta melalui PT JAKPRO yang menjadi sarana investasi bagi pihak swasta untuk berperan dalam penanganan sampah. Salah satu kemitraan yang dilakukan adalah kolaborasi dalam pengelolaan sampah *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dimana PT JAKPRO ditunjuk sebagai pelaksana dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah ITF Sunter yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir bantargebang.

Pemerintah Provinsi DKI Pernah memiliki kerjasama yang tidak berjalan dengan baik dalam tata kelola sampah. Merujuk pada Mulyadin, Iqbal, Ariawan (2018:179) dalam penelitiannya menjelaskan jika dalam kolaborasi penanganan sampah di DKI Jakarta menimbulkan terjadinya konflik. Konflik tersebut terjadi pada pihak-pihak yang terkait dalam tata kelola sampah diantaranya Pemprov DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan DPRD Kota Bekasi.

Konflik diawali dengan adanya permasalahan distribusi sistem angkutan sampah dari kota Jakarta menuju tempat pembuangan akhir Bantargebang sebagai akibat pelarangan pendistribusian sampah oleh Pemerintah Kota Bekasi yang

berdampak terhadap gundukan sampah di wilayah kota Jakarta. Tahun 2015, terdapat konflik pada tata kelola sampah dimana Pemprov DKI Jakarta memberikan Surat Peringatan kepada PT Godang Tua Jaya. Permasalahan ini disebabkan karena terdapat wanprestasi dalam kontrak yang harus dipenuhi oleh PT Godang Tua Jaya diantaranya kewajiban untuk membangun *incinerator* (metode penghancuran sampah melalui pembakaran) dan pengelolaan sampah yang menghasilkan energi listrik dari sampah, hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh PT Godang Tua Jaya. (Mulyadin, Iqbal dan Ariawan, 2018).

Permasalahan konflik terjadi karena DPRD Kota Bekasi menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) No 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang. Pelanggaran tersebut diantaranya seperti standarisasi truk sampah, rute dan operasional truk pengangkutan sampah yang tidak sesuai perjanjian, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat dan kendaraan yang sudah tua, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak di wilayah Kota Bekasi akibat menetesnya air dari truk sampah tersebut, pembuatan sumur pantau sebagai kompensasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang tidak berjalan, pembuatan sumur artesis atau air bersih yang selayaknya disediakan Pemprov DKI Jakarta namun tidak dilakukan, dan bantuan Kesehatan yang seharusnya dilaksanakan secara rutin hanya dilakukan satu tahun sekali oleh Pemerintah Kota Jakarta. (Mulyadin, Iqbal dan Ariawan, 2018).

Terdapat cara pandang yang berbeda diantara *stakeholders* dalam tata kelola sampah membuktikan perlu adanya proses untuk memfasilitasi, konsultasi,

koordinasi, konsiliasi dan rekonsiliasi, serta mediasi sebagai wujud penanggulangan konflik untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa harus menggunakan jalur hukum. Usaha mengentaskan permasalahan sampah diperlukannya usaha dan respons melalui suatu kerjasama antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kerjasama ini mencakup interaksi yang melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan manfaat dalam kerjasama tata kelola sampah.

Melihat masalah yang terdapat dalam tata kelola sampah yang ada di DKI Jakarta, Rencana Strategis tahun 2023-2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telah menetapkan program-program untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah dengan mengedepankan prinsip kolaborasi seperti keterlibatan masyarakat dalam tata kelola sampah, penguatan komitmen dan peran dari dunia usaha.

Berkaitan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini didasarkan Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Anshell and Gash (2008) bahwa kolaborasi yang baik harus melibatkan berbagai pihak dalam keberjalanannya. Model *Collaborative Governance* (Anshell & Gash, 2008), terdapat lima poin utama, yaitu 1) *Face to face dialogue* , 2) *Trust building*, 3) *Commitment to process*, 4) *Shared understanding*, dan 5) *Intermediate outcome*. Melalui kolaborasi harus melibatkan semua pihak masyarakat dengan harapan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sampah.

Penjelasan tentang permasalahan diatas memaparkan terdapatnya permasalahan dalam tata kelola sampah serta terdapatnya konflik dalam kebijakan tata pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Dari persoalan tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi mengapa kolaborasi pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu secara spesifik penelitian ini akan dikonsentrasikan pada bank sampah *Jalak Green Collection* sebagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur No 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga dan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah..

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Kepadatan penduduk yang semakin meningkat yang berdampak pada tingginya tingkat timbunan sampah
- 2) Upaya dalam penanganan tata kelola sampah belum maksimal dan tidak seimbang dengan timbunan sampah yang meningkat.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.
- 4) Terdapatnya konflik pada kebijakan kolaborasi pada tata kelola sampah di DKI Jakarta.
- 5) Terdapat konflik diantara aktor yang terlibat dalam rangka pengelolaan sampah.
- 6) Rumitnya hubungan antar *stakeholders* dalam pengelolaan sampah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur?
- 2) Apa saja faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur
- 2) Menganalisis faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berupa manfaat teoritis dan praktis, Adapun uraian manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan seagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada kajian teori yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan proses

Collaborative Governance sebagai upaya untuk mengentaskan pengelolaan sampah di Kota Jakarta sebagai sebuah rekomendasi. Hal ini dimaksudkan pada proses kolaborasi agar masyarakat senantiasa melakukan pola hidup yang baik.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta bermanfaat untuk dapat mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah Pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

1.4.3 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini disusun untuk memberikan ide-ide baru yang berarti untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan mengenai pengelolaan sampah Pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

2. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh informasi tentang pemberdayaan masyarakat dan peran serta pada tata kelola sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian dapat menjadi rekomendasi dan sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian serta landasan penelitian mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah Pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dalam menemukan bahan yang sebanding, kemudian bertujuan untuk mendapatkan pandangan baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian terdahulu ini juga akan meringankan peneliti menemukan dan membuktikan keaslian penelitian tersebut.

Bagian ini merupakan bagian dimana peneliti akan memuat bermacam-macam temuan pada penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusunnya dalam bentuk paragraf dan tabel abstrak, yang dapat dipilih dari penelitian yang dipublikasikan (jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya) yang diperoleh dari penelitian terdahulu, atau belum dirilis. Berikut beberapa penjelasan penelitian sebelumnya.

Kajian yang ditulis oleh Horas M. Panjaitan mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan kualitatif. Ditemukan model *Collaborative Governance* meliputi kondisi awal, proses kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan pada *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta masih konvensional dengan kontrol kepemimpinan yang sangat besar, hambatan pengetahuan dalam organisasi, dan kurang dalam membangun hubungan dalam pengelolaan sampah.

Muhashiby, Hasibuan dan S Wahyono dalam analisisnya mengenai manajemen pengelolaan sampah di Jakarta Recycle Centre (JRC) dengan studi kasus pesanggrahan dengan tujuan untuk Meneliti bagaimana Kecamatan Pesanggrahan mengelola sampah dengan menerapkan paradigma baru, yaitu

Reduce, Sorted, Procecssing dan mengevaluasi limbah system pengelolaan di Jakarta Recycle Cwenter (JRC). Hasil penelitian bahwa Jakarta Recycle Center yang mengadpsi pengelolaan sampah di Osaki, Jepang dengan dimulainya pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal dan pemilahan sampah sebelum diangkut oleh truk pemerintah. Penyortiran dibagi menjadi empat jenis pada tujuh hari yang berbeda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh warga dengan pemerintah.

Penelitian selanjutnya terkait dengan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu yang ditulis oleh Hidayat C, Muhammad Ridha, Lucitania R dalam artikelnya mengkaji tentang model dalam pengelolaan sampah. Desain pada penelitian ini bersifat kualitatif. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa proses kolaborasi terdiri atas dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, adanya kesamaan pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang diterima dalam pengelolaan sampah plastik laut.

Berbeda dengan penelitian diatas, Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah & Asep Kusdiman dalam artikelnya mengkaji tentang partisipasi public dalam penanggulangan sampah di Kota Bandung. Hasil penelitian ini memaparkan jika karakteristik sampah yang dominan sampah organik, partisipasi publik dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, pengetahuan tentang sampah tidak berpengaruh terhadap tingkat keikutsertaan masyarakat dalam tata kelola sampah.

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan persepsi dan partisipasi masyarakat adalah penelitian yang ditulis oleh Aditya Nugraha dan Surjono H.

Sutjahjo dalam artikelnya mengkaji tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui upaya mengelola sampah menjadi suatu benda lain yang memiliki manfaat. Nasabah Bank Sampah ternyata memiliki persepsi baik terhadap tata kelola sampah dan mendukung penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Tingkat persepsi masyarakat yang tinggi berpengaruh terhadap tata kelola sampah, semakin tinggi pula tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengelola sampah, begitu juga sebaliknya.

Berbeda dengan penelitian diatas, Mulyadin, dkk (2018) dalam artikelnya mengkaji tentang Konflik pengelolaan sampah yang terjadi di DKI Jakarta dengan berbagai pihak. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya konflik dalam tata kelola sampah di wilayah DKI Jakarta. Faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik yaitu tidak sesuainya proses kerjasama sesuai dengan kontraknya, hubungan yang tidak sinkron dan kurangnya sumber daya menjadi permasalahan utama penyebab terjadinya konflik.

Kajian selanjutnya datang dari Sri Utami Gayatri Tumiran mengenai kebijakan pengolahan sampah menjadi listrik di provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pembangunan *Waste to Energy* berjalan dengan sistem yang terbuka bagi aktor yang ingin terlibat seperti merangkul aktor-aktor yang memiliki kepentingan diantaranya perguruan tinggi sebagai peneliti dan pengembang teknologi. Selain itu, penguatan aktor dengan mengundang

masyarakat dan LSM untuk berperan serta dalam proses kolaborasi sesuai dengan kemampuannya.

Sapto Hermawan dan Wida Astuti mengulas penggunaan penta helix model sebagai upaya integratif memerangi sampah plastik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target penurunan sampah harus didukung oleh pemangku kepentingan sebagai model *penta helix*. Berdasarkan analisis tersebut, peran yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah sudah cukup baik. Namun, tiga elemen yang mencakup perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus. Penelitian tersebut berpendapat, jika masing-masing elemen berkolaborasi secara ternilai dan terpadu maka target dalam penurunan sampah laut akan lebih cepat terlaksana dan bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang dalam menjaga ekosistem.

Penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan sampah berbasis *Collaborative Governance*. Hasil temuan pada artikel ini mengenai tata kelola sampah berbasis *Collaborative Governance* di Kota Tarakan tidak dilakukan secara optimal, hal ini diakibatkan rendahnya keterikatan kontrak dalam kerja sama antara pihak pemerintah dan non-pemerintah yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang, pihak non-pemerintah dalam kerjasama ini hanya memberikan modal dan tidak mengetahui bagaimana modal tersebut akan dikelola, sedangkan pemerintah hanya melaksanakan, mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi faktor pengelolaan sampah di Kota Tarakan tidak berjalan optimal.

Kajian selanjutnya datang dari Adelia D & Arimurti K mengenai *Collaborative Governance* pada manajemen pengelolaan sampah dengan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan artikel sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama di kawasan TPST Tambakrejo berjalan lancar meskipun masih ada kendala. Penelitian ini menjelaskan jika kolaborasi pemerintahan telah berjalan optimal. Hal ini dapat dijelaskan melalui kerjasamanya jika ditinjau dari aspek *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008).

Tabel 1. 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	Peneliti: Horas M. Panjaitan, Aries Djaenuri, Reydonnyzar Moenek, Marja Sinurat Jurnal: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Vol. 11\No.4\ Oktober 2019: 505-515	Mengkaji tata Kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus pada kota DKI Jakarta	Ditemukan model <i>Collaborative Governance</i> meliputi kondisi awal, proses kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan pada <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta masih konvensional dengan kontrol kepemimpinan yang sangat besar, hambatan pengetahuan dalam organisasi, dan kurang dalam membangun hubungan dalam pengelolaan sampah.
2	Waster Management in Jakarta Recycle Centre: Case Study of Pasanggrahan, Jakarta	Peneliti: Muhashiby, Hasibuan, Wahyono Jurnal: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 940 (2021) 012034	Meneliti bagaimana Kecamatan Pesanggrahan mengelola sampah dengan menerapkan paradigma baru, yaitu Reduce, Sorted, Procecssing dan mengevaluasi limbah system pengelolaan di Jakarta Recycle Cwenter (JRC)	Jakarta Recycle Center yang mengadpsi pengelolaan sampah di Osaki, Jepang dengan dimulainya pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal dan pemilahan sampah sebelum diangkut oleh truk pemerintah. Penyortiran dibagi menjadi empat jenis pada tujuh hari yang berbeda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh warga dengan pemerintah
3	Model <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan	Peneliti: Hidayat Chusnus Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, Lucitania Rizky	Mendeskripsikan kolaborasi antar actor dalam pengendalian sampah plastic laut di Kepulauan Seribu	Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa proses kolaborasi terdiri atas dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, adanya kesamaan paham terkait tujuan yang ingin dicapai dan hasil antara dari

	Lingkungan Maritim di Kepulauan Seribu	Jurnal: Ketahanan Nasional Vol. 27, No. 3, Desember 2021, Hal 348-376		kolaborasi yang dilakukan antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut.
4	Partisipasi Publik Dalam <i>Collaborative Governance</i> Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung	Peneliti: Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, Asep Kusdiman Jurnal: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13, Nomor 1, Januari 2022 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762	Mndeksripsikan partisipasi public dalam aktivitas dan pembangunan yang berkaitan pada penanganan masalah sampah di Kota Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik sampah yang dominan sampah organik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi public dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan model sister city menunjukan bahwa faktor internal (pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, pengetahuan tentang sampah) sementara pengetahuan tentang sampah pada aspek (Jenis sampah) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, demikian juga faktor eksternal meliputi (peraturan, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas teknologi); Kondisi lingkungan (kondisi drainase) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi publik.
5	Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta Selatan	Peneliti: Aditya Nugraha, Surjono H. Sutjahjo, Akhmad Arif Amin Jurnal: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 8 No. 1 (April 2018): 7-14	Mengidentifikasi persepsi masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Menganalisis hubungan antara factor internal dan eksternal rumah tangga individu dengan persepsi terhadap pengelolaan rumah tangga	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Rawajati dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengelola sampah menjadi suatu benda lain yang memiliki manfaat. partisipasi yang merupakan hal penting dalam pengelolaan sampah mampu mengatasi permasalahan mengenai sampah yang terdapat dilingkungan masyarakat. Nasabah Bank Sampah Rawajati ternyata memiliki persepsi positif terhadap 3R dan mendukung penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah

				tangga, begitu juga sebaliknya, semakin negatif persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, maka akan semakin rendah partisipasinya dalam pengelolaan sampah.
6	Conflict Of Waste Management In DKI Jakarta And Its Recomended Solutions	Peneliti: R. Mohamad Mulyadin, Mohamad Iqbal & Kuncoro Ariawan Jurnal: Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 15 No.2, November 2018 : 179-191	Mengetahui sejarah konflik pengelolaan sampah DKI Jakarta, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, menganalisis penyebab timbulnya konflik pengelolaan sampah DKI Jakarta, dan memberikan alternatif solusi penyelesaian konflik sampah DKI Jakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konflik dalam tata kelola sampah di wilayah DKI Jakarta melibatkan para pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi D DPRD DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Faktor penyebab konflik antara lain pengelolaan TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerjasama, hubungan yang tidak harmonis dan ketidakmampuan pihak pengelola dalam mengolah sampah, serta tidak berjalannya sistem pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF).
7	Aktor dan Konfigurasi Subsistem dalam Perubahan Kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Listrik di Provinsi DKI Jakarta	Peneliti: Sri Utami Gayatri, M Baiquni, Muadjir Darwin, dan Tumiran Jurnal Magister dan Doktor Studi Kebijakan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Volume 26 Nomor 2 2018 Halaman 47-61	mengurai dan memetakan para aktor yang terlibat dalam perubahan kebijakan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Setelah para aktor terpetakan, pada tahap selanjutnya akan dapat diukur sejauh mana konfigurasi subsistem yang terbentuk sehingga mampu mendinamisasi perubahan.	Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pembangunan WTE di Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan sistem yang terbuka dengan memperbesar jejaring aktor, memobilisasi elemen/aktor lain diluar jejaring kebijakan, seperti merangkul aktor-aktor yang memiliki kepentingan diantaranya perguruan tinggi sebagai peneliti dan pengembang teknologi sehingga tercipta kerjasama <i>triple helix</i> . Selain itu, penggalangan aktor dengan merangkul masyarakat dan LSM untuk berperan aktif dalam proses kolaborasi sesuai dengan keahliannya.

8	Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik Di Laut Indonesia	Peneliti: Sapto Hermawan, Wida Astuti Jurnal: Bina Hukum Lingkungan P- ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 5, Nomor 2, Februari 2021	Menganalisis penggunaan model Penta Helix sebagai salah satu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di laut Indonesia melalui kajian dari masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target penurunan sampah plastik di laut harus didukung oleh semua elemen pemangku kepentingan sebagai model <i>penta helix</i> . Berdasarkan analisis tersebut, peran yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah sudah cukup baik. Namun, tiga elemen yang mencakup perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus. Penelitian tersebut berpendapat, jika masing-masing elemen berkolaborasi secara terukur dan terintegrasi maka target dalam penurunan sampah laut akan lebih cepat terealisasi dan bermanfaat dalam waktu jangka panjang dalam menjaga ekosistem laut.
9	Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Collaborative Governance</i> Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Peneliti: Djogeh Harmana, Ella Wargadinata, Ismail Nurdin Jurnal: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Vol. 13 \ No. 2\ Agustus 2021: 247–259	Menganalisis pengelolaan sampah berbasis <i>Collaborative Governance</i> dan juga untuk menganalisis terhadap peran masing-masing stakeholder pengelolaan sampah berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Tarakan.	Pengelolaan sampah berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Tarakan belum berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan rendahnya komitmen dalam kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak swasta yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang pemerintah dengan pihak swasta dalam hal memperbaiki lingkungan, pihak swasta dalam kerjasama ini hanya memberikan modal dan tidak mengetahui bagaimana modal tersebut akan dikelola, sedangkan pemerintah hanya melaksanakan, mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi faktor pengelolaan sampah di Kota Tarakan tidak berjalan optimal.

10	<i>Collaborative Governance In Waste Management (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency)</i>	Peneliti: Adelia Dwinta Amelinda, Arimurti Kriswibowo Jurnal: Jurnal Administrasi Publik, 2021 June Vol. 19 No 1 e- ISSN: 2615-7268	Menentukan proses kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan masyarakat swasta sedang berlangsung di kawasan TPST Tambakrejo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama di kawasan TPST Tambakrejo berjalan lancar meskipun masih ada kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa itu kolaboratif pemerintahan telah berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kerjasamanya jika ditinjau dari aspek <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell dan Gash.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

1.5.2 Administrasi Publik

A. Definisi Administrasi Publik

Sondang Siagian (dalam Astuti, Warsono, Rachim 2020:18) mendefinisikan administrasi adalah proses dalam kerja sama diantara sekelompok orang yang dilakukan secara logis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi di atas mencakup banyak hal. Pertama, administrasi adalah suatu seni yang hanya mempunyai awal dan tidak ada akhir. Kedua, beberapa kondisi yang bersifat mengendalikan, yaitu 1) dua orang atau lebih, 2) terdapatnya tujuan, 3) terdapatnya pekerjaan dan kegiatan yang wajib dipenuhi, 4) terdapatnya sarana penunjang.

Banyak ahli yang mengemukakan definisi administrasi publik. Pfiffner dan Presthus (1960) dalam Syafiie (1999, p. 24) menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Administrasi publik sebagai pelaksana dalam kebijakan yang ditentukan lembaga-lembaga politik.
2. Administrasi publik diumpamakan penggabungan upaya penyatuan kelompok kepentingan untuk melaksanakan kebijakan. Sebagian besar terkait dengan kegiatan pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik merupakan prosedur yang menyertakan penerapan kebijakan pemerintah, pengelolaan berbagai keterampilan dan proses, serta pemberian arahan dan tujuan pada pekerjaan banyak orang.

Administrasi dalam pelayanan publik mengacu pada pengelolaan pelayanan, meliputi perencanaan, , pelaksanaan dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik atas inovasi pelayanan yang dilakukan oleh instansi dan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya (mencapai tujuan) dan mengalokasikan sumber daya (berdasarkan kebutuhan masyarakat). menyediakan barang/jasa dengan cara

yang paling efisien kepada masyarakat yang mempunyai daya untuk mendorong atau meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kehormatan dan harkat dan martabat bangsa.

ciri-ciri dari administrasi pelayanan publik:

- Kegiatan dilakukan oleh pemerintah;
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat mendasar,
- Baik berupa barang maupun jasa publik;
- Terkait dengan kepentingan masyarakat umum.

Dengan menjelaskan berbagai pengertian administrasi publik dari sudut pandang para ahli, maka dapat ditetapkan bahwa administrasi publik adalah serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada lembaga-lembaga publik dan swasta untuk menciptakan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi memiliki cakupan yang luas berdasarkan kebutuhan dan perkembangan dalam masalah di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang harus diterapkan dalam meninjau keberjalanan administrasi publik di suatu negara adalah dengan meninjau beberapa lembaga baik lembaga resmi maupun non-resmi didalam suatu negara atau wilayah.

Chandler dan Plano (dalam Kaban, 2014: 8) meyakini bahwa semakin kompleks dan semakin besar permasalahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula tekanan yang perlu dilimpahkan pada pihak yang berwenang seperti pemerintah yang lebih bervariasi.

Nicholas Henry (dalam Kaban, 2014: 8) memaparkan informasi mengenai ruang lingkup administrasi publik yang dapat dikaji melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Administrasi publik, dalam hal ini bergantung pada berbagai pola organisasi dan perilaku dalam birokrasi.
2. Manajemen publik, berkaitan dengan sistem dan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen, evaluasi pelaksanaan proyek dan tingkat produktivitas, pendanaan yang diperlukan untuk memberikan kepentingan publik, dan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Penerapan mengacu pada pendekatan kebijakan publik dan penerapan kebijakan tersebut, upaya untuk mengubah kepemilikan publik menjadi kepemilikan swasta, tata kelola antar pemerintah yang dilakukan dengan etika birokrasi.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma menggambarkan konsep yang digunakan para ahli untuk menggambarkan aspek-aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan cara pandang ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

Nicholas Henry (1989) salah seorang ahli yang mengemukakan enam contoh disiplin ilmu administrasi publik, yaitu:

a. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini berasumsi bahwa perlunya pemisahan politik dan administrasi merupakan cara untuk menentukan daya guna dan efektivitas. Woodrow Wilson (1897) mengemukakan empat prinsip manajemen publik yang efektif, yaitu (1) pemisahan politik dan administrasi, (2) analisis komparatif administrasi politik dan swasta (3) melalui praktik korporasi serupa. Dan sikap terhadap pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi, (4) Meningkatkan efisiensi

pelayanan publik dalam mengelola dan melatih pejabat, serta mendorong evaluasi berbasis kinerja. Pemerintah harus apolitis karena tidak boleh mendukung kepentingan politik tertentu dalam melayani masyarakat. Kelemahan paradigma ini adalah hanya menfokuskan pada lokasi, yakni birokrasi pemerintahan, namun masalah administrasi publik belum dibahas secara jelas dan rinci.

b. Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Prinsip manajemen umum yang dapat diterima kapanpun dan dimanapun. Gullick dan Urwick (1937) mengemukakan 7 prinsip administrasi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting (POSDCORP). Letak paradigma takkan dijelaskan secara rinci dikarenakan mereka percaya prinsip mampu diterapkan dimana-mana, termasuk di pemerintahan, sehingga dalam paradigma ini fokus lebih difokuskan daripada lokus.

c. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1950-1970)

Menurut Herbert Simon (1947), politik dan administrasi adalah hal yang tidak terpisahkan. Periode ini mencoba merekonstruksi keterkaitan konseptual baik administrasi negara maupun ilmu politik. Pada paradigma ini, manajemen publik adalah ilmu politik, dan kedudukannya adalah birokrasi pemerintahan. Saat ini manajemen publik sedang berada dalam kondisi miskin identitas, karena ilmu politik dirasa sebagai disiplin ilmu yang begitu menguasai di bidang manajemen publik.

d. Administrasi Publik Sebagai Manajemen (1956-1970)

Administrasi dalam hal ini didefinisikan sebagai semua penelitian dalam ilmu organisasi dan manajemen, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rencana secara lebih akurat. Fokus di sini lebih penting daripada lokasi.

e. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970- 1990)

Pada paradigma ini, manajemen publik memiliki tujuan serta posisi yang jelas. Dalam paradigma ini, tujuan administrasi publik yakni teori organisasi serta kebijakan publi yang berfokus adalah pada isu dan kepentingan umum.

f. Governance (1990-Sekarang)

Paradigma ini menekankan pada perubahan konsep pemerintahan dan administrasi. Perubahan dicatat dalam tiga kategori, yaitu globalisasi, redefinisi, dan desentralisasi. Globalisasi menggabungkan perusahaan multinasional, Internet, masalah lingkungan dan perdagangan internasional. Mendefinisikan ulang proses aktual dari kekuasaan hierarki menjadi kolaborasi dan kemitraan. Fokus desentralisasi adalah partisipasi warga negara, kelompok warga dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah berpartisipasi dalam sektor swasta, masyarakat dan teknologi untuk menyelesaikan semua kebijakan dan masalah publik.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma 6 yaitu paradigma *Governance*. Penelitian ini masuk dalam paradigma Governance sebab dalam paradigma ini telah dijelaskan jika desentralisasi sebagai salah satu diantara klasifikasi yang ada menyebutkan bahwa partisipasi warga negara, kelompok warga, dan kemitraan swasta publik ikut berperan dalam kegiatan urusan publik, hal ini berarti dalam paradigma ini sudah melibatkan banyak pihak atau aktor yang berperan dalam

urusan publik. Pemerintah telah melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan teknologi didalam mengatasi setiap kebijakan dan permasalahan publik, seperti halnya dengan penelitian ini yang membahas bagaimana hubungan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di bank sampah *Jalak Green Collection* Jakarta timur.

1.5.4 Kebijakan Publik

Secara istilah, terdapat banyak definisi kebijakan publik, bergantung interpretasi kita. Easton mengartikan kebijakan publik selaku penjabaran nilai otoritatif kepada setiap masyarakat. Laswell dan Kaplan mengartikan bahwa “kebijakan publik selaku rencana tujuan, nilai serta aplikasi, ataupun rencana untuk menggapai tujuan serta nilai dalam penerapan yang ditargetkan”

Pressman serta Widavsky (dalam Budi Winarno, 2002: 17) mengartikan “kebijakan publik selaku anggapan berdasarkan keadaan dini serta konsekuensi yang bisa diprediksi”. Kebijakan publik wajib berbeda dari wujud kebijakan yang lain, semacam kebijakan swasta. Ini tunduk pada intervensi aspek non- pemerintah. Leo Agustino (2008: 6) melansir pengertian Robert Eyestone mengenai kebijakan publik yakni “selaku ikatan antara lembaga pemerintah serta lingkungannya.” Banyak orang memperhitungkan definisi tersebut sangat luas agar dimengerti, sebab penafsiran kebijakan publik bisa mencakup berbagai macam aspek.

Islamy (2009:19) dalam Thomas R Dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (meskipun pemerintah memilih melakukannya atau tidak). Hal ini menekankan pada kebijakan publik ialah manifestasi dari "tindakan", tidak sekedar mengungkapkan kehendak pemerintah.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, bisa diberi kesimpulan yakni kebijakan publik mengacu pada serangkaian aksi yang dicoba ataupun tidak dicoba oleh pemerintah untuk tujuan tertentu dalam rangka menuntaskan permasalahan publik ataupun untuk kepentingan universal. Kebijakan melaksanakan sesuatu umumnya tertuang dalam peraturan ataupun perundang-undangan yang terbuat oleh pemerintah, sehingga bersifat mengikat serta harus.

Menurut Subarsono (2009) (dalam Irwan Abdu, 2017:25) mengutip dari Michael Howlet dan M. Ramesh, terdapat 5 tahapan dalam kebijakan publik diantaranya:

1. Menetapkan agenda (*agenda setting*), meskipun menjadi urusan yang dapat menarik pandangan pemerintah;
2. Pembuatan kebijakan (*policy formulation*), yaitu tahapan pemerintah mengambil atau membentuk kebijakan;
3. Pengambilan keputusan (*decision making*), adalah tahapan pemerintah memutuskan untuk bertindak atau tidak;
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), bagian dari implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan;
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

Menurut beberapa definisi di atas terdapat keterkaitan, yaitu kebijakan publik adalah rencana kegiatan, dan rencana kegiatan ditujukan untuk pelayanan publik, dalam hal ini masyarakat adalah tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik disini terstruktur dan dapat dilaksanakan dengan cara tertentu sesuai dengan isi dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini masuk dalam

proses yang ke-empat yakni proses implementasi kebijakan (implementation policy) dalam hal ini implementasi kebijakan yang dimaksudkan adalah *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

1.5.5 *Governance*

Governance digunakan sebagai penamaan untuk mewakili istilah “administrasi publik” (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Istilah “*governance*” sebagai perwujudan “*government*”, perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah penamaan yang sama dari “*government*”. *Governance* berfokus pada keterkaitan aktor dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dikarenakan pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sudah semakin luas akan tantangan dan masalah yang dijumpai dimasyarakat (Dwiyanto, 2018).

Menurut Roderick Rhodes, *governance* mengacu pada transformasi organisasi pemerintah yang memiliki makna luas meliputi sebuah prosedur manajemen baru (*new process of governing*), perubahan undang-undang yang mengatur bagaimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996).

Roderick Rhodes menjelaskan beberapa karakter yang menonjol dari *governance* (Rhodes, 1996). Terdapat 4 (empat) poin yaitu:

1. Istilah “*governance*” mempunyai arti yang lebih kompleks dengan mengikutsertakan aktor non-pemerintah sehingga terjadi hubungan yang berketergantungan.

2. Kelangsungan hubungan antar kelompok yang dilatarbelakangi kebutuhan untuk bertukar sumber daya;
3. Hal ini berasal dari hubungan saling percaya dan aturan yang dihasilkan dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor; dan
4. Terdapatnya kemandirian untuk terlepas atau otonom dari pemerintah.

Pada dasarnya karakteristik *governance* akan berbeda berdasarkan siapa yang mempunyai otoritas untuk mengelola kebijakan, program, undang-undang dan dasar hukumnya, orientasi demokratis, hubungan antara aktor, dan bentuk atau kondisi akuntabilitas (Hanberger, 2004).

1.5.6 Collaborative Governance

Istilah *Collaborative Governance* adalah tata kelola publik yang mengikutsertakan pemangku kepentingan non-pemerintah yang berorientasi terhadap kesepakatan dan permufakatan dalam pembuatan keputusan dan bertujuan untuk menciptakan atau mengimplementasikan kebijakan publik. (Ansell dan Gash, 2008).

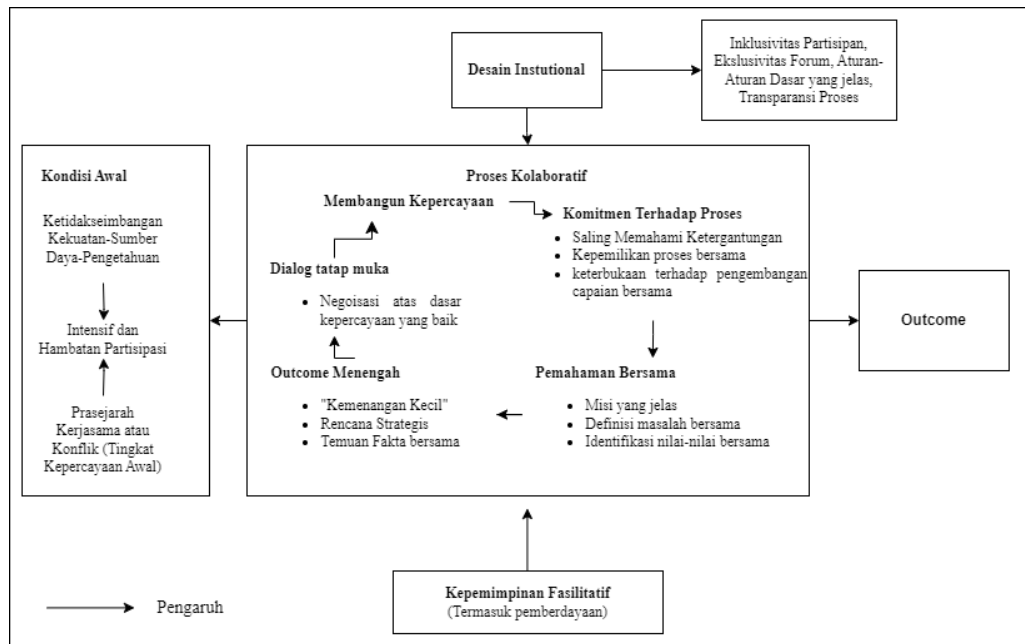
Menurut O’Leary dan Bingham (dalam Sudarmo, 2015) kolaborasi adalah suatu aturan yang mengilustrasikan proses pengelolaan dan implementasi yang mengikutsertakan banyak organisasi untuk mengentaskan permasalahan yang mustahil untuk dilakukan hanya oleh satu organisasi. Pandangan ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mengemukakan bahwa kolaborasi adalah suatu bentuk aktivitas antara dua institusi atau lebih yang bermitra dengan tujuan untuk meningkatkan “*public value*” dibandingkan dilakukan secara terpisah.

Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan setara dimana setiap aktor yang memiliki kepentingan

di dalamnya memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk mencerminkan agenda mereka dalam proses tersebut. Bovaird menyimpulkan bahwa kemitraan antara publik-swasta secara sederhana sebagai pengaturan kinerja berdasarkan kewajiban bersama dan bukan berdasarkan kontrak antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor publik (Dwiyanto, 2011).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Bovaird, dikatakan jika kemitraan adalah suatu bentuk kemitraan yang lebih dari sekadar kontrak kemitraan. Kemitraan yang dijelaskan dalam istilah kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah adalah kemitraan yang setiap pihak memiliki permasalahan di luar apa yang tertulis dalam perjanjian.

Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019) pada jurnal *Collaborative Governance in Theory and Practice* mengembangkan model tata kelola kolaboratif berdasarkan tinjauan literatur. Hasil penelitian tersebut diuraikan dalam 4 (empat) variabel utama, yakni: meliputi: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif.



Gambar 1. 7 Model *Collaborative Governance*

Sumber: Ansell and Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019)

1) Kondisi awal

Kondisi di awal berlaku pada awal dilaksanakannya proses kolaborasi, adanya kondisi yang menjadi pendorong atau kondisi yang menghambat kerjasama antar pemangku kepentingan dan antar lembaga/organisasi. Terdapat variabel utama dalam kondisi awal ini, diantaranya: keseimbangan pengaruh/ kekuasaan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan. Secara historis, baik dalam bentuk kerjasama yang sudah terjadi maupun konflik yang muncul antar pemangku kepentingan dan berbagai insentif dan hambatan untuk berperan dalam kerjasama.

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dilakukan berdasarkan undang-undang atau aturan pada kontrak kerjasama, ini merupakan suatu hal penting karena peraturan mengatur setiap pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Hal ini ditegaskan dalam desain kelembagaan mengenai peluang dalam kerjasama, cara pembentukan forum, aturan dalam pelaksanaan dan keterbukaan pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam kolaborasi, jumlah permasalahan/perbedaan yang mungkin timbul atau ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan semakin meningkat seiring waktu, namun di sisi lain sangat diperlukan partisipasi pemangku kepentingan untuk ikut terlibat. Dibutuhkannya kepemimpinan dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan pemimpin yang dapat diandalkan sebagai penengah dalam kerjasama.

Pemimpin yang kuat, dihormati dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam suatu kerjasama karena akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat ini seringkali datang dari komunitas yang berkepentingan itu sendiri.

4) Proses Kolaboratif

1. Dialog tatap muka

Seluruh tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan “komunikasi antar pemangku kepentingan”. Komunikasi ini merupakan suatu proses penting yang berujung pada lahirnya suatu ide/kesepakatan. Komunikasi ini sering dilakukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang dengan menyajikan informasi yang menyarankan para pemangku kepentingan agar dapat bekerja sama pada situasi yang saling menguntungkan.

2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari proses komunikasi/dialog. Pemimpin yang kolaboratif harus mampu membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan usaha.

3. Komitmen terhadap proses

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4. Pemahaman Bersama

Adanya hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan meningkatkan komitmen dalam kerjasama. Patut ditegaskan bahwa kerjasama bukanlah sebuah kontrak tunggal, melainkan sebuah proses kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

5. Hasil sementara (Pertengahan)

Kolaborasi akan terus berkembang ketika hasil dari tujuan dan manfaat dari kolaborasi tersebut terwujud, meskipun terbatas sebagai hasil sementara dari kolaborasi tersebut. Hasil kecil ini bisa sangat membantu dalam membangun kepercayaan dan loyalitas dikalangan pemangku kepentingan.

1.5.7 Konsep Sampah

Menurut Hendargo (dalam Fian Afandi, 2010:12) menyatakan sampah merupakan suatu barang yang tidak mempunyai nilai, baik digunakan untuk keperluan umum ataupun untuk produksi khusus. Hal ini juga terjadi pada saat produksi barang atau barang yang rusak atau hilang. Menurut ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Sampah adalah proses dari sisa-sisa berbentuk padat yang dihasilkan kegiatan manusia. Hadiwiyoto (dalam Fian Afandi, 2010: 12) memberikan definisi lebih lanjut tentang sampah yang mana bahan sisa-sisa sudah

terurai, sudah diolah satu kali, dan tidak berguna lagi. Dari sudut pandang ekonomi ekonomi sudah tidak relevan, dan sudut pandang ekologi mengganggu atau merugikan kehidupan alam.

Sampah yang terakumulasi di lingkungan sangat bergantung kemampuan lingkungan untuk memproduksinya. Jumlah sampah terus meningkat dan lingkungan sekitar tidak dapat terserap semua. Bila dilihat dari faktor keseimbangan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan pencemaran lingkungan, seperti: pengumpulan sampah menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan pH tanah mengeluarkan zat tidak baik bagi lingkungan. (Hadiyotou dalam Fian Effendi. 2010:13). Pencemaran udara terjadi dipengaruhi oleh tumpukan sampah yang mana sampah-sampah tersebut membusuk dan mengandung gas beracun, bau, serta saat musim hujan munculnya lumpur. Akibatnya, O₂ hilang dari udara sehingga menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan hewan. Secara khusus, sampah menjadi ladang penyebaran penyakit dan habitat sebagian hewan, seperti anjing, serangga, tikus, serta lalat. Berdasarkan faktor keindahan, sampah dianggap mengurangi daya tarik estetika lingkungan. Sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) berdasarkan tempat asalnya, antara lain:

Berdasarkan sumbernya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2, diantaranya:

1. Sampah organik

Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari sumber daya hayati yang dapat di olah mikroorganisme. Dalam kondisi alami sampah ini sangat cepat terurai. Sebagian besar sampah rumah tangga merupakan bahan organik

seperti sampah rumah tangga, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, dan ranting termasuk kedalam sampah organik.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik yaitu sampah dari bahan tak hidup, melalui hasil pengolahan bahan tambang dan produk sintetis. Sampah anorganik dapat dibagi ke dalam kategori berikut: sampah berbahan logam dan produk kayu, yang terbuat dari plastik, sampah terbuat dari kertas, yang terbuat dari kaca atau keramik dan sampah dibuat dari deterjen.

1.5.8 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan merupakan mengontrol dan memanfaatkan faktor sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan (Prajudi, dalam Fian Effendi, 2019:15). Output sampah yang ditimbulkan dapat dilakukan pengendalian melalui daur ulang sampah yang dapat digunakan kembali sebagai bahan masukan untuk proses pembuatan (misalnya kertas, karton, plastik, logam, botol, dll). Dalam kasus lain, sampah dapat dibuat kompos (biasanya menggunakan bahan organik). Terakhir, sampah dapat disimpan di tempat yang telah ditentukan untuk pengelolaan sampah.

Neolaka (dalam Rama, 2013) menyatakan jika pengolahan sampah merupakan salah satu cara untuk menciptakan keindahan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi antara masyarakat dengan pihak berwenang atau instansi pemerintah. Menurut Arif (2010: 70) ada tiga tahap dalam pengelolaan sampah:

1. Tahap Pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber

Sampah di suatu tempat tertentu (hotel, apartemen, atau lokasi lainnya) terlebih dahulu disimpan di tempat penyimpanan khusus yang sering dikenal yaitu tempat

sampah. Cara mengumpulkan sampah basah dan kering adalah selayaknya dipisahkan agar mudah untuk proses pemusnahan. Dipo merupakan bak besar yang digunakan sebagai wadah sampah yang sudah dikumpulkan sebelumnya sesuai dengan jenis sampah tersebut.

2. Tahap pengangkutan

Sampah yang sudah terkumpul di dalam dipo kemudian dipindahkan ke tempat pembuangan akhir dengan memanfaatkan kendaraan pengangkut yang disediakan oleh pihak yang berwenang (Dinas Lingkungan Hidup).

3. Tahap pemusnahan

Terdapat beberapa metode, antara lain:

a. Sanitary Landfiil

Sistem pemusnahan sampah yang baik pada umumnya menggunakan metode Sanitary Landfiil yang mana sampah ditimbun dengan tanah agar sampah tersebut musnah secara sempurna. Dengan demikian sampah tidak berada di ruang terbuka dan tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

b. Incineration

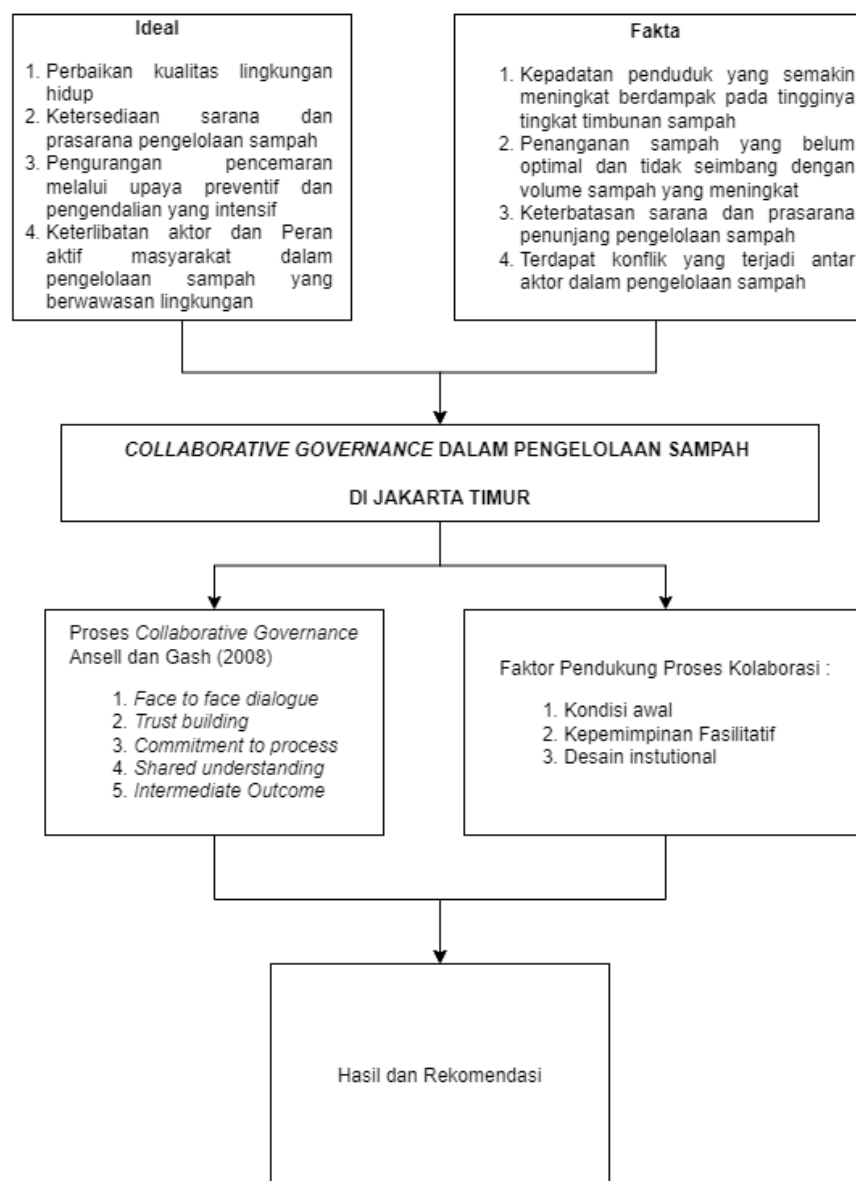
Pada metode ini, sampah dimusnahkan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan fasilitas pabrik.

Perlu berbagai cara untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien. Pendekatan ini mencakup semua tahapan mulai dari asal hingga titik pemrosesan akhir (untuk barang dan jasa), termasuk pengolahan, pengangkutan, dan pemulihan akhir dengan menggunakan kebijakan “3 R” (*Reuse, Reduce dan Recycle*). Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ayat (20), perlu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah, karena banyaknya sampah menimbulkan

permasalahan dan dampak negatif terhadap lingkungan disebabkan pengelolaan sampah yang kurang baik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Model *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk penjabaran identifikasi tentang siapa saja aktor yang terlibat berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan, analisis peran aktor yang terbentuk di dalamnya.



Gambar 1. 8 Kerangka Berpikir

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, Collaborative Governance diartikan sebagai proses kolaboratif dari berbagai pihak dalam membuat keputusan yang didasari oleh konsep model menurut Ansell dan Gash (2008). Model Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection Jakarta Timur yaitu sebagai Berikut:

a. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Seluruh tata kelola kolaboratif terbangun dari dialog tatap muka antar pemangku kepentingan yang berorientasi untuk melahirkan consensus/kesepakatan yang memunculkan kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama.

b. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan adalah proses lanjutan dari kolaborasi dengan pemimpin kolaborasi bertanggung jawab dalam membangun kepercayaan antar *stakeholders* dengan berbagai proses salah satunya keterbukaan informasi. Rasa percaya dapat dimiliki dari kemampuan yang dimiliki oleh tiap *stakeholders* dan juga dapat terbangun seiring berjalan kolaborasi itu.

c. *Commitment to process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen terhadap kolaborasi adalah variable utama dalam menjelaskan sukses tau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen dalam bekerjasama bergantung pada kepercayaan bahwa sesama pengaku kepentingan saling menghormati pandangan dan menghargai kepentingan. Dalam proses ini, saling ketergantungan atau ketidakmampuan dalam segala hal dapat

menjadi alasan seseorang untuk berkomitmen, dan karena kemampuan yang dimiliki serta konsisten dalam kinerjanya, komitmen untuk tetap berkolaborasi terus berlanjut.

d. *Shared understanding* (saling memahami)

Dibeberapa bagian proses kolaborasi, pemangku kepentingan harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap tujuan bersama. Pemahaman bersama ini yaitu seperti masalah apa yang ingin mereka selesaikan, tujuan apa yang ingin mereka capai bersama-sama, serta nilai yang ingin mereka capai dari kolaborasi tersebut melalui komunikasi yang efektif diantara pemangku kepentingan.

e. *Intermedite Outcome* (hasil sementara)

Intermediate outcomes atau bisa disebut juga sebagai dampak sementara merupakan proses kolaborasi yang dimana *stakeholders* atau pihakpihak yang memiliki kepentingan mendapatkan hasil atau keuntungan yang nyata dari kolaborasi tersebut, walaupun keuntungan-keuntungan yang didapatkan kecil. Keuntungan kecil tersebut dapat menjadi pendorong bagi tiap *stakeholders* agar tetap terus melakukan kolaborasi.

Pada dasarnya kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ansell dan Gash (2008) menguraikan beberapa variable yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses *collaborative governance*, diantaranya yaitu:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah tahap awal dalam membentuk hubungan, dimana aktor-aktor dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda memutuskan untuk bekerja sama dan berkolaborasi guna mencapai visi dan tujuan bersama. Tahapan ini terdiri dari tiga aspek yaitu ketimpangan kekuasaan atau pengaruh stakeholder, pengetahuan, sumber daya, Sejarah terkait kerjasama atau konflik antar *stakeholders*, dorongan dan hambatan dalam kolaborasi

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen utama dalam *collaborative governance*, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan para pemangku kepentingan ke dalam forum untuk mencapai konsensus dalam kerja sama serta sebagai pengawas dalam kegiatan kolaborasi.

3. Desain Institusional

Desain institusional mencakup kerangka peraturan yang ada dalam kolaborasi dan telah disetujui oleh semua aktor yang terlibat. Keberhasilan kolaborasi akan tercapai apabila seluruh aktor merasakan dampaknya dan memperhatikan isu yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan kejelasan peraturan dan transparansi, dimana para pemangku kepentingan memiliki keyakinan bahwa proses tersebut setara, menyeluruh dan transparan.

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Dimensi	Indikasi Penelitian
Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah <i>Jalak Green Collection</i> Jakarta Timur	Dialog tatap muka	• Adanya konsensus/kesepakatan bersama • Peluang yang menguntungkan
	Membangun kepercayaan	• Rasa percaya • Keterbukaan informasi
	Komitmen terhadap proses	• Saling ketergantungan • Komitmen dalam bekerjasama
	Saling memahami	• Komunikasi efektif • Membangun kesepahaman
	Hasil sementara	• Keuntungan yang didapatkan
faktor pendukung proses <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah <i>Jalak Green Collection</i> Jakarta Timur?	Kondisi awal	• Ketidakseimbangan antara kekuatan, sumber daya • Sejarah konflik atau kerjasama diantara pemangku kepentingan
	Kepemimpinan fasilitatif	• Pengawasan kegiatan kolaborasi • Memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan
	Desain kelembagaan	• Aturan hukum yang digunakan sebagai landasan kolaborasi • Proses transparansi dalam kolaborasi

1.8 Argumen Penelitian

Pada penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Jakarta Timur ini dilatar belakangi dimana kondisi masyarakat yang masih kurang dalam pengetahuan dan peran aktif menangani masalah lingkungan. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah sehingga upaya penanganan sampah menjadi tidak maksimal dan tidak seimbang dengan sampah yang meningkat. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya yaitu bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur dan apakah faktor keberhasilan yang mempengaruhinya. Hal tersebut diteliti berdasarkan teori

Proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008). Penulis berargumen bahwa masalah tersebut ada dikarenakan tidak berjalan dengan maksimal serta masih kurangnya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat. Kedua hal itulah yang menyebabkan pengelolaan sampah ini kurang tidak berjalan dengan baik dan tidak berkembang.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memahami masalah (Creswell, 2012). Dalam dunia pendidikan, penelitian diartikan sebagai langkah-langkah yang peneliti gunakan ketika mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memahami masalah pendidikan.

Setiap penelitian tentunya memiliki metode penelitiannya sendiri. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai sekumpulan ilmu tentang tata cara (metode) yang tersusun dan masuk akal dalam mencari data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan bertipe deskriptif. Studi ini sering disebut sebagai studi kuasi-kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ada. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan akan berupa teks, gambar, bukan data digital. Jika ada nomor, itu hanya untuk dukungan. Kajian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang objek observasi dan keadaannya. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen dan observasi.

1.9.1 Jenis Penelitian

Pasolong dalam Metode Penelitian Administrasi Publik (2012:75) memaparkan sejumlah tipe yang terdapat di dalam penelitian, yakni:

- a. Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Penelitian Deskriptif mengacu pada penelitian yang menggambarkan kondisi di mana ia terjadi. Upaya dilakukan untuk menggambarkan, membuat catatan, menganalisis, dan menafsirkan ke dalam situasi saat ini dalam dokumen semacam ini. Studi-studi ini mencoba untuk mengumpulkan beberapa data asli dan mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor dengan menggunakan metode ini. Studi ini tidak memeriksa hipotesis melainkan dengan cara yang dapat dianggap berguna secara objektif.

b. Penelitian Eksploratif (Penjajakan)

Ini adalah sebuah penelitian yang memiliki sifat terbuka, terus mengeksplorasi dan tidak memiliki hipotesa, pengetahuan dalam melangsungkan penelitian terkait gejala. Ketika melakukan penelitian tentang gejala, masih ada kelangkaan pemahaman tentang bagaimana melakukan penelitian dan penelitian semacam ini umumnya digunakan sebagai langkah pertama dalam melakukan penelitian deskriptif. Masalah yang dibahas dalam penelitian dapat lebih tepat dirumuskan dengan mengklarifikasi semua data.

c. Penelitian Explanatory (Penjelasan)

Dalam sebuah studi penjelasan, fokusnya adalah pada keterkaitan antara variabel yang dipelajari, dan hipotesis diuji atau penelitian dilakukan untuk melihat apakah mereka tahan terhadap pengawasan.

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dengan menyajikan data secara sistematis, terpercaya, dan akurat berdasarkan fakta dan situasi yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan menjawab lebih dalam

mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan desain penelitian ini disebabkan keinginan peneliti untuk melangsungkan penganalisaan sekaligus pendeskripsian terhadap proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

1.9.2 Situs dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area dimana penelitian akan dilakukan. Dari hal tersebut, lokasi penulisan tentang proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Jakarta Timur adalah Bank Sampah *Jalak Green Collection*.

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah dan faktor pendukung yang mempengaruhinya.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang berperan menjadi penyedia data terkait fenomena yang akan diteliti. Penyedia informasi penelitian ini ialah individu atau kelompok yang benar-benar mengerti latar belakang atau kondisi tempat penelitian, dalam artian sudah ahli pada bidangnya. Teknik pemilihan informan yang dipakai adalah *Purposive*, dimana teknik sampling yang digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Teknik ini dipilih secara khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dimana setiap informan mengetahui tentang pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur.

Adapun informan dari penelitian ini yaitu informan yang terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam mengenai pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur:

Informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Bank Sampah *Jalak Green Collection* Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur
3. Pengelola bank sampah *Jalak Green Collection*
4. Mahasiswa Universitas Indonesia
5. Masyarakat

1.9.4 Jenis Data

Menurut ahli dari Lofland Moelong (2007: 157), sumber data utama untuk penelitian kualitatif ialah ucapan serta perilaku, dan selebihnya adalah data lain, berupa dokumen. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Kata-kata dan Tindakan

Sumber utama informasi adalah perkataan dan perbuatan yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Sumber dapat direkam dalam bentuk tertulis, atau direkam dalam bentuk video, foto atau film. Dalam melakukan penelitian ini peneliti harus mengkaji kondisi *Collaborative Governance* dan peran peserta yang terlibat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* agar dapat melihat gejala apa saja yang ada.

b. Sumber Tertulis

Sumber data utama terkadang gagal memenuhi kebutuhan data penulis. Bagi penulis, tidak jarang penulis mencari data lain dari sumber tertulis. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi buku dan majalah ilmiah, koran atau surat kabar, tabloid, arsip, dokumen baik pribadi maupun resmi.

c. Foto

Dengan perkembangan zaman, penerapan teknologi dalam penelitian menjadi semakin luas. Foto yang diperoleh selama penelitian dapat menjadi sumber data deskriptif yang bermakna besar dan dapat dijadikan sarana untuk menganalisis sudut subjektif dalam penelitian. Penggunaan foto dalam penelitian sangat bermanfaat, anda hanya perlu mendeskripsikan situasi pada foto yang terkait dengan pertanyaan penelitian

d. Data Statistik

Dalam penelitian kualitatif, data statistik biasanya digunakan sebagai data tambahan. Statistik ini dapat membantu memberikan gagasan tentang tren mata pelajaran di lingkungan penelitian. Diharapkan statistik akan digunakan sebagai pengantar dan akan membawa penulis pada kegiatan dan peristiwa yang didapatkan, dan menemukan dirinya berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian. (Moleong, 2007: 157-162).

1.9.5 Sumber Data

Menurut Loftland (1984:47) dalam Moleong (2004: 157) sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan jenis data lainnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data didapat langsung dari sumbernya. Data asli didapatkan dengan menjawab pertanyaan yang ditujukan peneliti kepada informan melalui wawancara atau melalui observasi secara langsung. Dalam hal ini, peneliti bisa langsung mengunjungi data pendukung untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan berdasarkan data yang sesuai.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data pembantu umumnya berupa tulisan atau karya terkait peristiwa terkait yang pernah terjadi baik bentuk buku, karya, majalah, dokumen, data, foto, surat kabar, internet, dan sumber lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari buku, internet, dan dokumen jurnal maupun artikel.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dari sumber data melalui sesi tanya jawab langsung atau tidak langsung secara lisan atau tatap muka. Moleong (1993:135) mengartikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Pembicaraan dikerjakan oleh dua pihak, yakni penanya yang memberikan pertanyaan dan pihak yang menjadi narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan melalui wawancara yang tidak terstruktur, artinya wawancara diijinkan membuat pertanyaan lebih fleksibel, dengan pertanyaan

lebih terbuka, namun tetap terkonsentrasi, sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam dan tidak kaku.

2. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data dengan mengamati dan menulis peristiwa yang diinvestigasi secara terstruktur. Menurut Mardalis (1995:63), metode observasi merupakan hasil dari perilaku mental yang aktif dan terkonsentrasi untuk memahami suatu stimulus tertentu yang diperlukan, atau suatu kajian yang terencana dan sistematis terhadap kondisi atau fenomena sosial dan gejala psikis melalui observasi dan pencatatan hasil.

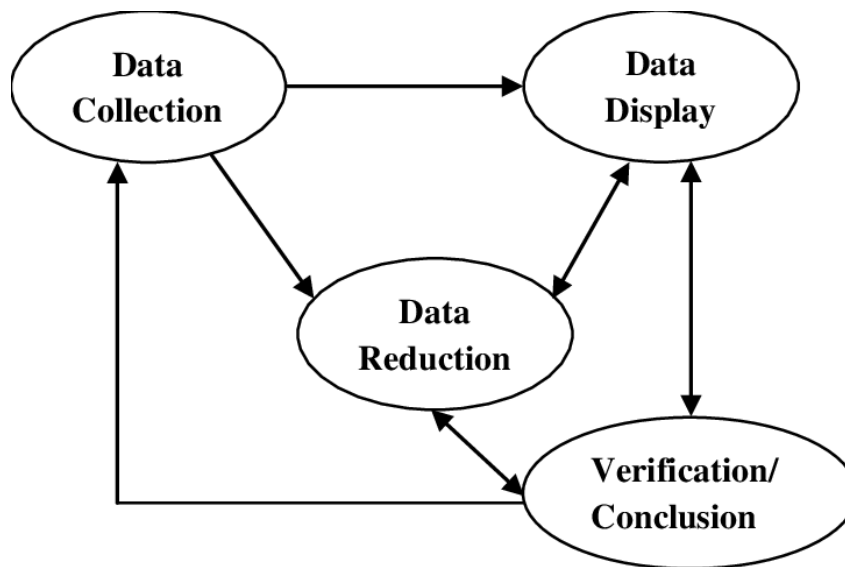
Pengamatan peneliti dapat diwujudkan dengan merekam informasi terkait model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*. Melalui observasi tersebut, penulis dapat memahami konteks data dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh bukti data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Artinya, kegiatan pengecekan sumber data pada dokumen yang sudah ada dan dapat dijadikan sumber untuk memperkuat data yang telah didapatkan. Metode kepustakaan adalah tambahan dari metode observasi serta wawancara. Dokumen bisa berupa katakata manusia, gambar atau karya peringatan. Saat menggunakan metode dokumen, penulis menyelidiki objek tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti buku, majalah, dokumen, dan peraturan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif dilaksanakan melalui pengolahan data, mengorganisasi data, dikategorikan ke dalam komponen yang bisa dikelola, menyusunnya, mencari dan menemukan pola, menemukan halhal penting dan belajar, beserta dengan memutuskan apa yang akan diberikan kepada orang lain (dalam Moleong, 2007: 248).



Gambar 1. 9 Analisis Data Kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Saldana, 2014)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Saldana 2014) mengacu pada kerangka kerja yang mereka kembangkan dalam buku "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook". Dalam bukunya, mereka menyajikan serangkaian langkah-langkah dan konsep-konsep penting yang dapat digunakan untuk menganalisis data kualitatif secara sistematis.

1. Pengumpulan data ialah proses yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan.

2. Reduksi data dilakukan apabila proses menyatukan data dimulai dari membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis catatan, dan lain sebagainya dengan tujuan menyeleksi data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Uji keabsahan adalah proses pemeriksaan keberadaan atau kebenaran dengan menggunakan uji kredibilitas data yang digunakan dengan memanfaatkan metode triangulasi.
4. Penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya sehingga mempermudah dalam memahami fenomena yang terjadi dalam penyusunan rencana kerja.
5. Penarikan kesimpulan data yang diperoleh telah dianalisis kemudian akan dijelaskan dan diartikan dalam bentuk kalimat yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta di lapangan.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki reputasi dan standar legalitas yang baik. Standar kredibilitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa hasil penelitian kualitatif mempunyai kredibilitas tinggi berdasarkan fakta di lapangan.

Mengenai teknik triangulasi, William Wiersma (Sugiyono, 2016: 372) menjelaskan triangulasi sebagai pemeriksaan data berdasarkan sumber, metode, dan waktu. yaitu:

- a. Triangulasi sumber adalah uji validitas dengan memeriksa data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber

- b. Triangulasi teknis adalah tes kredibilitas yang menggunakan wawancara, kemudian melalui studi pustaka, dokumentasi dan observasi.
- c. Triangulasi waktu ialah pengujian sumber data yang sama pada waktu yang berbeda.
- d. Triangulasi teoris adalah penggunaan lebih dari satu sudut pandang teoritis untuk memeriksa data ketika membahas masalah yang diteliti (Moleong, 2005: 331).

Data penelitian ini, uji kualitas data yang digunakan ialah triangulasi sumber, dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi melalui wawancara pada satu informan saja, tetapi melaksanakan wawancara dengan orang yang berbeda berdasarkan kebutuhan informan yang akan di wawancarai guna memperoleh informasi yang benar valid di lapangan. Setelah itu memastikan kebenaran atau validitas data melalui analisis hasil wawancara dengan kondisi dilapangan dengan cara melakukan observasi dan juga dokumentasi.